



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFUL BAHRI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 93465

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 455.000.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 270.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, SUZUKI XL7 AT BETA SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	63.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	197.904.433
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	986.404.433
III. HUTANG	Rp.	283.191.118
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	703.213.315

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.